

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

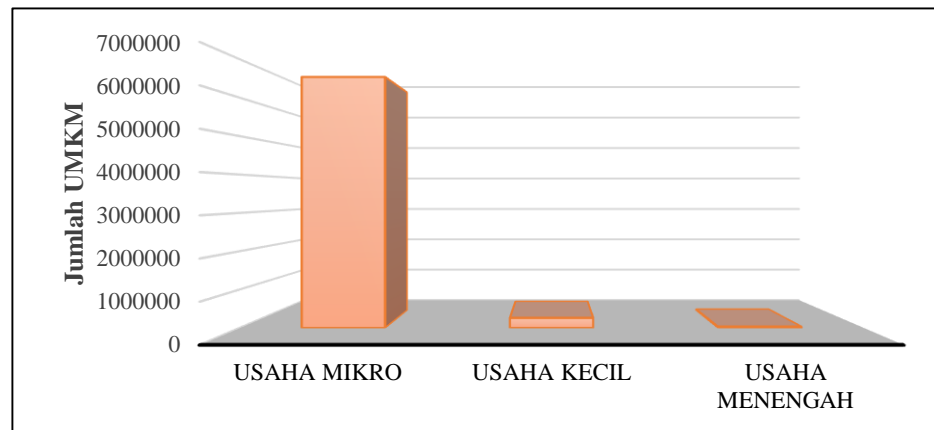
Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah berperan penting bagi laju perekonomian sebagai salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan cukup penting dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga UMKM dikenal memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pasca adanya krisis ekonomi yang ada di Indonesia pada tahun 1998, jumlah UMKM tidak berkurang, justru semakin meningkat sampai sekarang.

Secara statistik, UMKM telah memberikan kontribusi 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan juga menyerap kurang lebih 97% dari pekerja nasional.<sup>1</sup> UMKM juga akan memberikan pilihan bagi mereka yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan untuk kemudian mendirikan usaha. Hal inilah yang akan memicu lahirnya para pengusaha-pengusaha muda khususnya di Jawa Timur yang memiliki kemauan kuat untuk memiliki penghasilan sendiri dengan berwirausaha. Berikut jumlah UMKM yang sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017.

---

<sup>1</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 152.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Jawa Timur pada tahun 2017 didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah sebanyak 6.533.694 (95,72%), usaha kecil sebanyak 261.827 (3,84%) dan jumlah usaha menengah sebanyak 30.410 (0,45%) dengan jumlah keseluruhannya yaitu 6.825.931 UMKM.<sup>2</sup> Tingginya usaha mikro dikarenakan masyarakat mengawali atau mendirikan usaha dengan modal yang tidak terlalu besar, biasanya bersumber dari keluarga sendiri daripada meminjam di lembaga keuangan akan tetapi belum terjamin usahanya akan berjalan lancar.

Begitu pula perkembangan UMKM juga terlihat di salah satu Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang didalamnya sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan letaknya terdapat pada bagian Provinsi Jawa Timur. Di daerah yang memiliki luas 1.261,40 km<sup>2</sup> ini banyak terdapat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar diberbagai kecamatan maupun

<sup>2</sup> Diskopukm Jawa Timur, *Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota*, dalam <http://diskopukm.jatimprov.go.id/subkonten/details/57> diakses 29 November 2018 pukul 21.35.

desa di Kabupaten Trenggalek. Berbagai macam jenis UMKM ada di Kabupaten ini, antara lain meliputi: potensi hasil dari perkebunan, seperti cengkeh, kopi, ketela pohon, jagung, sayuran, kakao, dalam hal buah ada pisang, manggis, belimbing, durian, alpukat dan lain-lain.

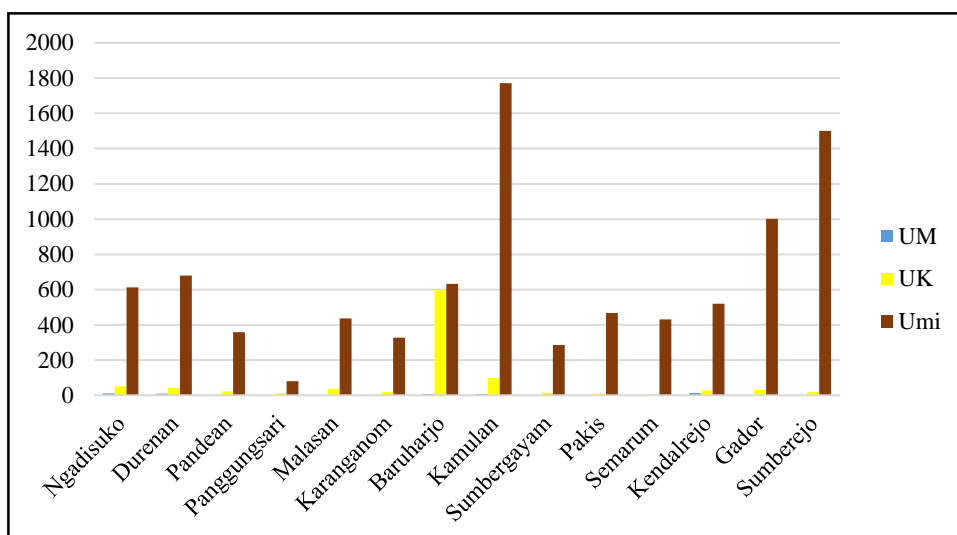
Selain dari hasil potensi perkebunan, ada juga potensi yang dihasilkan dari industri kerajinan seperti aneka macam souvenir, pengrajin genteng, bata dari tanah liat; potensi industri makanan seperti alen-alen, tempe kripi, kue manco, sale pisang; potensi industri perikanan seperti hasil tangkapan laut berupa cumi-cumi, ikan tuna dan lain lain. Masyarakat Trenggalek saat ini juga mengandalkan potensi pantai prigi, pantai pelang, pantai konang, pantai blado dan lain-lain. Potensi UMKM di Kabupaten Trenggalek ini bisa dikatakan cukup baik.

Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek berjumlah 143.455 dengan berbagai potensi yang terdiri dari potensi pertanian sebanyak 106.239, pertambangan dan penggalan sebanyak 851, industri pengolahan sebanyak 13.237, konstruksi sebanyak 141, perdagangan hotel dan restoran sebanyak 17.978, transportasi sebanyak 1.342, keuangan sebanyak 66 dan jasa-jasa sebanyak 3.601.

Adapun salah satu di Trenggalek yaitu Kecamatan Durenan. Kecamatan Durenan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan sebagian besar pelaku usaha, hal ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan

sektor ekonomi di Kecamatan ini. Banyaknya sumberdaya alam di Kecamatan Durenan meliputi pertanian, peternakan, ladang dan perikanan bisa dijadikan potensi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, sentra industri kecil atau industri rumahan juga banyak di Kecamatan ini. Berikut data jumlah UMKM di Kecamatan Durenan pada tahun 2017.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah UMKM di Kecamatan Durenan Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Trenggalek, Kecamatan Durenan Dalam Angka 2018

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa jumlah UMKM di Kecamatan Durenan sebanyak 9.548 dengan rincian pada Desa Ngadisuko sebanyak 675, Desa Durenan sebanyak 731, Desa Pandean sebanyak 381, Desa Panggungsari sebanyak 94, Desa Malasan sebanyak 473, Desa Karanganom sebanyak 346, Desa Baruharjo sebanyak 382, Desa Kamulan sebanyak 1880, Desa Sumbergayam sebanyak 300, Desa Pakis sebanyak 478, Desa Semarum sebanyak 436, Desa Kendalrejo sebanyak 559, Desa Gador sebanyak 1035 dan Desa Sumberejo sebanyak 1518 UMKM.

Peran UMKM memang sudah tidak bisa diragukan lagi dalam hal pembangunan ekonomi. Potensi UMKM merupakan suatu peluang untuk mengembangkan pasar dan industri di Indonesia terutama pada sektor riil. Namun pada kenyataannya, peluang UMKM untuk berkembang sering kali terhambat akibat masalah mendasar yang seringkali dialami oleh para pelaku usaha itu sendiri. Setyobudi yang mengutip survei Bank Indonesia menyatakan bahwa UMKM yang ada masih memiliki kinerja yang rendah dalam hal ketrampilan dan kemampuan mengelola keuangan.<sup>3</sup>

Banyak temuan oleh peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa tingkat pemahaman keuangan para pelaku UMKM di lapangan masih rendah, hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Astuti dan Santoso yang dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa pelaku UMKM di lapangan belum mempunyai pengetahuan yang memadai terkait tentang keuangan.<sup>4</sup> Hal inilah yang sangat disayangkan, seharusnya para pelaku UMKM sudah sepatasnya dituntut untuk memiliki kecerdasan dalam hal finansial agar usahanya semakin berkembang.

Sebenarnya paham keuangan atau yang biasa disebut dengan Literasi Keuangan bukan ditujukan untuk mempersulit masyarakat dalam mengelola keuangan, justru dengan adanya literasi keuangan inilah yang akan membuat seseorang mampu dalam mengelola keuangan yang

---

<sup>3</sup> A. Setyobudi, *Peran Serta Bank Inndonesia dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 5(2)), hal. 31-32.

<sup>4</sup> C. Tri Widiastuti dan Aprih Santoso, *Model Manajemen Edu-Finance untuk Meningkatkan Literasi Keuangan pada UMKM Kayu Kota Semarang* (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 24, No. 2, September 2017), 112-118.

dimikinya secara tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendeskripsikan literasi keuangan sebagai pemahaman ataupun pengetahuan terhadap risiko keuangan, baik itu ketrampilan, motivasi maupun keyakinan yang akan diterapkan dalam pengambilan keputusan keuangan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dimasa depan.

Literasi keuangan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pada masing-masing perorangan atau individu, bahkan sampai suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sujianto, bahwa literasi keuangan sangatlah penting karena tidak hanya membawa implikasi terhadap kemajuan dan kesejahteraan perorangan atau individu, keluarga dan organisasi saja, akan tetapi juga dapat membawa dampak kesejahteraan dalam suatu negara yang biasanya diukur atau dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara tersebut.<sup>5</sup>

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2017 yang dilakukan oleh OJK menyatakan gambaran kondisi literasi keuangan yang ada di Indonesia yang dihitung dengan Indeks Literasi Keuangan dari 100 penduduk hanya sekitar 30 penduduk yang masuk dalam kategori *well literate* atau hanya 29,7%. *Well literate* dikatakan kondisi pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki individu mengenai lembaga jasa keuangan

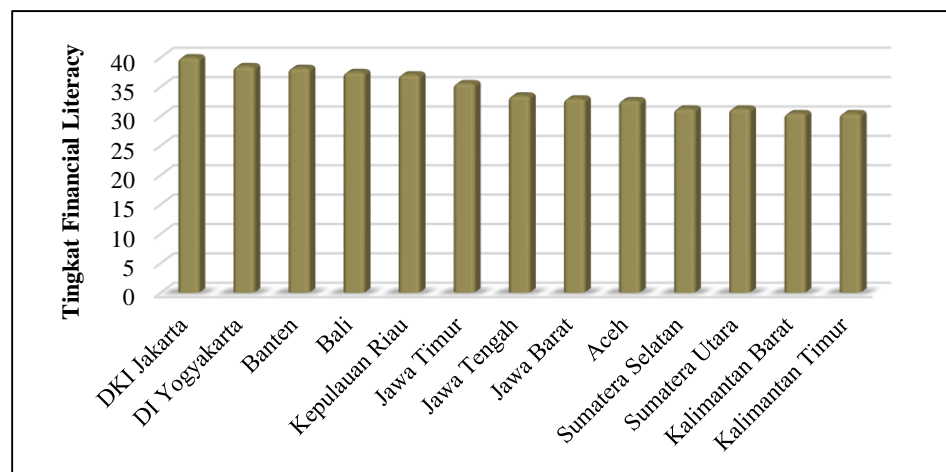
---

<sup>5</sup> Agus Eko Sujianto, *Pendamping Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 2.

beserta produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut.

Tidak meratanya pengetahuan masyarakat di Indonesia mengenai pengetahuan keuangan juga terlihat dari survei yang telah dilakukan OJK dalam Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2017 yang menyatakan bahwa dari 34 provinsi yang ada hanya ada 13 provinsi yang memiliki Indeks Literasi Keuangan diatas rata-rata. Untuk lebih jelasnya berikut data provinsi yang memiliki Indeks Literasi Keuangan diatas rata-rata yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**Grafik 1.3**  
**Data Provinsi dengan Indeks Literasi Keuangan diatas Rata-Rata (%)**



Sumber: OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017

Dari grafik diatas terlihat bahwa DKI Jakarta ada ada posisi pertama dengan indeks Literasi Keuangan sebesar 40,0%, kemudian dilanjutkan DI Yogyakarta dengan 38,5%, Banten dengan 38,2%, Bali dengan 37,5%, Kepulauan Riau dengan 37,1%, Jawa Timur dengan 35,6%, Jawa Tengah dengan 33,5%, Jawa Barat dengan 33%, Aceh dengan 32,7%, Sumatera Selatan dengan 31,3%, Sumatera Utara dengan

31,3%, Kalimantan Barat dengan 30,5%, dan Kalimantan Timur dengan 30,5% dengan tingkat rata-rata Indeks Literasi Keuangan Nasional yaitu 29,7%.

Karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan tentang keuangan yang dimiliki masyarakat, OJK selaku regulator telah mengeluarkan program peningkatan literasi keuangan dengan nama Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Dalam program ini OJK membidik sasaran kelompok masyarakat tertentu yang diharapkan bahwa target pencapaian literasi keuangan pada masyarakat Indonesia semakin cepat tercapai, antara lain: Pelajar/mahasiswa, UMKM, profesi, perempuan, karyawan, petani & nelayan, pensiunan, TKI & calon TKI, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah tertinggal, terpencil & terluar.

Literasi keuangan bagi UMKM akan membantu bagi pelakunya terkait dengan pengelolaan usaha dimulai dari anggaran, perencanaan simpanan dana usaha, serta pengetahuan dasar atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha tentunya. Literasi keuangan juga sangat diperlukan pelaku usaha agar UMKM mampu menentukan pilihan dan manfaat produk dan jasa layanan keuangan yang dibutuhkan, khususnya pada lembaga keuangan syariah sehingga para pelaku UMKM dapat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.



Akan tetapi untuk lebih mendukung program yang dilakukan oleh OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada kelompok-kelompok masyarakat diatas khususnya para pelaku UMKM, juga harus didukung dengan kemudahan para pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan khususnya pada bank syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Rifa'i bahwa lembaga keuangan syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BRRS) di dalam penelitiannya sudah mampu memperlihatkan keterlibatannya secara luas dalam mengimplementasikan Inklusif Keuangan.<sup>6</sup>

Disini pemerintah mempunyai peran penting untuk meningkatkan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah agar lebih bersifat inklusif atau pemerintah harus membangun inklusif keuangan untuk kesejahteraan para pelaku UMKM. Inklusif keuangan merupakan suatu kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016 merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat tentang visi, misi, sasaran, dan kebijakan inklusif keuangan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, percepatan

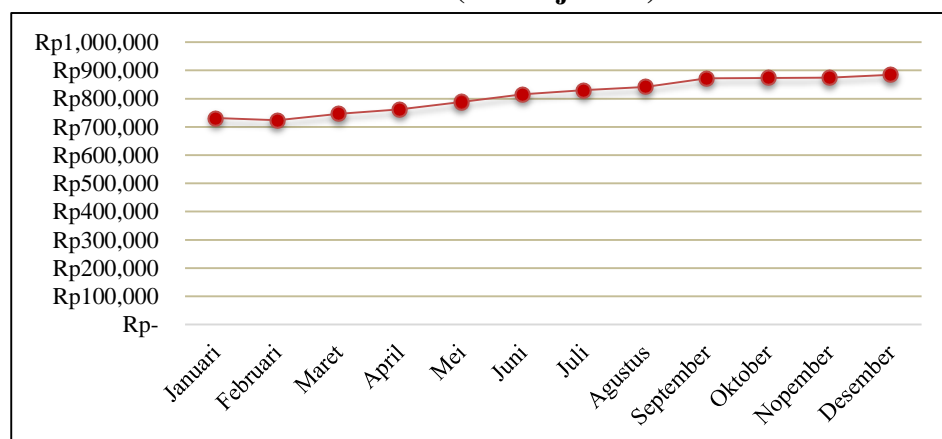
---

<sup>6</sup> Achmad Rifa'i, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM* (Yogyakarta: *Ikonomika Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No. 2, 2017), 199.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang *Strategi Nasional Keuangan Inklusif* (Jakarta: t.p., 2016), 9-10.

penanggulangan kemiskinan, dan pengangguran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Pemerintah dalam hal ini sebenarnya menargetkan Indeks Inklusif Keuangan menyentuh level 75%. Saat ini jumlah kredit yang telah disalurkan perbankan untuk digunakan pada sektor UMKM di wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri semakin meningkat akan tetapi belum dikatakan cukup signifikan. Berikut data pertumbuhan kredit UMKM di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017.

**Grafik 1.4**  
**Data Pertumbuhan Kredit UMKM di Kabupaten Trenggalek**  
**Tahun 2017 (dalam jutaan)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2018

Dari grafik diatas terlihat bahwa kredit perbankan yang diberikan untuk UMKM di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017 meningkat setiap bulannya akan tetapi kurang signifikan. Terlihat bahwa pada bulan Januari jumlah kredit UMKM di Kabupaten Trenggalek sejumlah 731,094 (jutaan rupiah), Februari sejumlah 724, (jutaan rupiah), Maret sejumlah 746,526 (jutaan rupiah), April sejumlah 762,615 (jutaan rupiah), Mei sejumlah 787,795 (jutaan rupiah), Juni 815,618 (jutaan rupiah), Juli

<sup>8</sup> *Ibid.*, 10.

830,060 (jutaan rupiah), Agustus 841,030 (jutaan rupiah), September 872,345 (jutaan rupiah), Oktober 873,433 (jutaan rupiah), Nopember 873,830 (jutaan rupiah) dan Desember sejumlah 884,827 (jutaan rupiah).

Berbicara soal bank syariah di Indonesia perkembangan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini bisa disebabkan karena Indonesia sebagai masyarakat Muslim terbesar ini masih mendambakan sistem keuangan secara syariah. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode tahun 2011 hingga Oktober 2018 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS**  
**Tahun 2011-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>BUS</b>								
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1390	1734	1987	2163	1990	1869	1825	1866
<b>UUS</b>								
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	312	493	567	320	311	332	344	345
<b>BPR Syariah</b>								
Jumlah Bank	155	158	163	163	162	166	167	168
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	441	450

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2018

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah dari mulai 8 tahun yang lalu pada tahun 2011 sampai sekarang bertambah menjadi 14 pada tahun 2018. Dan jumlah kantor dari tahun 2011 yaitu 1390 naik sampai tahun 2018 yaitu berjumlah 1866 kantor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap adanya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam persoalan ekonominya.

Saat ini keuangan syariah semakin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasanya dengan berlandaskan syariat Islam. Dan hal inilah diharapkan menjadi solusi bagi praktik keuangan yang mengarah pada riba, maysir dan gharar. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan literasi. Dalam Al-Qur'an sudah banyak disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekayaan dan keuangan, seperti halnya zakat, shodaqoh, wakaf, sehingga dari situlah diperlukan perencanaan keuangan. Islam juga mengatur semua hal kehidupan salah satunya memberikan arahan dalam memperoleh pendapatan, konsumsi, menabung, investasi, mengelola harta dan segala aspek yang berkaitan dengan keuangan.

Namun pada kenyataannya dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Syariah masyarakat Indonesia sekarang ini masih pada posisi 8,1% yang artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 8 orang saja. Angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Indeks Literasi Keuangan konvensional yang saat ini berada pada angka 29,5%.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan, Revisit 2017* (Jakarta: t.p., 2018), 51.

Sepertinya hal ini juga dikarenakan perkembangan inklusif keuangan syariah yang ada di Indonesia juga masih sangat kurang dibandingkan dengan konvensional. Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusif Keuangan tahun 2016, perkembangan inklusif keuangan hanya sebesar 11,1% jauh tertinggal dari konvensional yang mencapai 65,6%.<sup>10</sup> Fakta ini sangatlah disayangkan dengan melihat pada kenyataan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia adalah penduduk Muslim, seharusnya ini dibarengi dengan pengetahuan masyarakat tentang jasa keuangan syariah yang tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut data perbandingan keadaan literasi keuangan syariah dan inklusif keuangan syariah di berbagai provinsi di Indonesia.

**Grafik 1.5**  
**Data Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Inklusif Keuangan Syariah Provinsi di Indonesia**



Sumber: OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017

Dari data diatas terlihat bahwa indeks literasi keuangan syariah di Jawa Timur paling tinggi yaitu mencapai 29.4% dibandingkan dengan provinsi lainnya, hal ini bisa dikatakan bahwa tingkat pengetahuan dan

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional...*, 53.

keyakinan masyarakat di Jawa Timur tentang jasa keuangan syariah dikatakan cukup baik dari pada provinsi lainnya. Akan tetapi keadaan ini tidak diimbangi dengan keadaan inklusif keuangan yang memadai, karena tingkat inklusif keuangan syariah di Jawa Timur masih rendah yaitu 12,2%. Hal ini menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan syariah, penggunaan serta kualitas keuangan syariah di Jawa Timur.

Rendahnya akses layanan finansial ini selain disebabkan oleh terbatasnya tingkat penetrasi perbankan, juga karena terbatasnya edukasi, terbatasnya akses terhadap transaksi pembayaran dan akses kredit. Ekonom Senior *Institute for Development of Economic and Finance*, Damanhuri mengatakan bahwa perbankan harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pada sektor UMKM untuk selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan bahwa selama ini perbankan belum mengoptimalkan penyaluran kredit pada pelaku UMKM dan hanya mementingkan kebutuhan pembiayaan pada skala besar.

Edukasi pada UMKM secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan mengenai literasi keuangan dan inklusif keuangan membangun fondasi bisnis yang kuat sangat dibutuhkan. Peningkatan pengetahuan keuangan dan peningkatan upaya pemerintah membangun keuangan yang inklusif diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stabilnya sistem keuangan, mengurangi kerentanan dalam sistem keuangan

dan membuat keputusan yang efektif terhadap sumber daya keuangan para pelaku UMKM di Kecamatan Durenan.

Dalam sebuah usaha seperti UMKM, pengambilan keputusan dalam hal keuangan tentunya dilakukan oleh manajer atau pemilik usaha itu sendiri. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat, pemilik harus memiliki literasi keuangan yang cukup baik, dan juga didorong oleh berbagai aspek dalam menentukannya, salah satunya pengaruh dalam diri pelaku usaha tersebut baik itu pengaruh internal maupun eksternal atau biasa disebut *locus of control*. *Locus of control* merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi perilaku keuangan seseorang.

*Locus of control* akan baik apabila seseorang mampu mengontrol keuangannya dengan baik, dan juga sebaliknya akan berdampak buruk apabila seseorang tersebut tidak mampu mengontrol keuangannya dengan baik. Oleh karenanya seorang pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Durenan harus dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan keuangan dalam usahanya dengan baik, mengambil keputusan dengan efektif dan efisien agar usaha yang dimilikinya tersebut menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tentang masih rendahnya tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM serta mendukung upaya pemerintah meningkatkan akses inklusif keuangan pada masyarakat dengan pengontrol diri para pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kinerja

keuangan UMKM di Kecamatan Durenan, maka dari itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusif Keuangan Syariah dan *Locus of Control* terhadap Kinerja Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”**

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini terkait dengan: Literasi Keuangan, tingkat literasi UMKM pada lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non bank (IKNB), dan pasar modal masih sangat minim. Faktanya, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Kemampuan mereka untuk memahami produk dan layanan keuangan tertinggal jauh dari perkembangan produk-produk keuangan, baik itu tabungan, investasi maupun pembiayaan. Padahal literasi keuangan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Inklusif Keuangan Syariah, kurang optimalnya persebaran layanan keuangan syariah di Indonesia yang disebabkan karena akses yang belum menjangkau secara penuh. Selain itu juga ada kesenjangan yang semakin melebar antara kompleksitas produk dan layanan keuangan dengan kemampuan masyarakat untuk memahami apa yang mereka beli. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa tingginya tingkat perkembangan produk-



produk keuangan tidak selalu memiliki dampak positif mengingat tidak semua produk dan layanan keuangan cocok dengan masyarakat.

*Locus of Control*, banyak masyarakat pelaku UMKM yang banyak mengalami kegagalan dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah keuangannya. Hal itu dikarenakan para pelaku itu sendiri belum bisa mengontrol apa yang ada dalam diri mereka sendiri, baik itu dari semangat, inisiatif maupun kepercayaan diri yang dimilikinya. Mereka masih cenderung mengandalkan aspek dari luar kepribadiannya seperti lingkungan sekitar serta pengaruh orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak orang masih gagal dalam mengatur keuangan usahanya.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang pengaruh dari literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah terhadap peran kinerja keuangan dengan *locus of control* yang dalam penelitian ini menggunakan *internal locus of control* sebagai variabel *moderating* pada UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan batasan variabel dalam penelitian ini adalah literasi keuangan, inklusif keuangan, *internal locus of control* dan kinerja keuangan UMKM.

#### 1. Unit Analisis

Unit analisis di dalam penelitian ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Dan adapun subyek dalam penelitian ini yakni para pelaku usaha mikro dengan jumlah asset maksimal Rp. 50.000.000,- dengan omzet maksimal Rp. 300.000.000,- , usaha kecil dengan kriteria jumlah asset maksimal lebih dari Rp.

50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dengan omzet lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-. dan usaha menengah dengan jumlah asset maksimal lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dengan omzet Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-.di seluruh Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## 2. Lokasi Penelitian

Dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan peneliti dalam hal biaya dan waktu, maka lokasi penelitian ini hanya difokuskan pada UMKM yang tersebar di seluruh Kecamatan Durenan di Kabupaten Trenggalek.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Adakah pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Adakah pengaruh inklusif keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

4. Apakah *locus of control* memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
5. Apakah *locus of control* memoderasi hubungan inklusif keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, dalam penulisan penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menguji adakah pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menguji adakah pengaruh inklusif keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menguji apakah literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk menguji apakah *locus of control* memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
5. Untuk menguji apakah *locus of control* memoderasi hubungan inklusif keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji:

- 1 Literasi keuangan ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- 2 Inklusif keuangan syariah ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- 3 Literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- 4 *Locus of control* secara signifikan memoderasi hubungan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- 5 *Locus of control* secara signifikan memoderasi hubungan inklusif keuangan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Banyak pihak yang bisa memanfaatkan dan memetik dari hasil penelitian ini, adalah:

### **1. Manfaat Teoretis**

Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dijadikan *literatur* bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembacanya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah informasi dan pengetahuan pada kajian bidang ilmu keuangan yang berkaitan dengan literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah dengan sifat kepribadian yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja UMKM khususnya dalam kinerja keuangan agar usahanya bisa lebih berkembang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Akademik**

Untuk pihak akademik, diharapkan penelitian ini menjadi perbendaharaan kepustakaan. Selain itu bisa digunakan untuk referensi penelitian-penelitian kembali.

#### **b. Pelaku UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan tingkat pemahaman tentang keuangan dibidang literasi keuangan dan inklusif keuangan syariah dalam mengambil

keputusan perihal keuangan pada usahanya dengan kepribadian yang dimilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan usahanya agar lebih berkembang.

c. Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengelola jasa keuangan untuk lebih meningkatkan edukasi keuangan khususnya bagi pelaku UMKM.

d. Penelitian Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan oleh peneliti selanjutnya terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

**Literasi Keuangan** merupakan pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>11</sup>

**Inklusif Keuangan Syariah** merupakan suatu upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan

---

<sup>11</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan...*, 8.

syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

*Locus of control* merupakan individu yang memiliki keyakinan yang stabil akan mendapatkan suatu hal yang penting pada situasi dalam diri yang akan menentukan perilaku individu tersebut.<sup>13</sup>

**Kinerja keuangan** merupakan suatu gambaran kondisi keuangan dalam perusahaan yang dianalisis melalui alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penelitian ini mengambil judul terkait bagaimana para pelaku UMKM Kecamatan Durenan ini harus mampu memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup baik disertai dengan didukungnya pemerataan akses layanan inklusif keuangan syariah oleh pemerintah setempat khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan kontrol dalam diri yang dimiliki (*internal locus of control*) para pelaku UMKM sebagai variabel *moderating* agar kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Durenan semakin meningkatkan.

---

<sup>12</sup> Irfan Sauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016), 221.

<sup>13</sup> Howard S. Friedman & Miriam W. Schustack, *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern Edisi 3* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 275.

<sup>14</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.